

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perancangan ini berangkat dari pengetahuan soal musik dan arsitektur, tentang interaksi keduanya sebagai sebuah keilmuan tunggal dalam praktik dan teoritisnya. Ketika melihat fenomena penggabungan antara keduanya, musik dan arsitektur kerap menjadi dua hal yang sifatnya sama perihal formalitas dan informalitas praktik. Misalnya, kebanyakan arsitektur yang berangkat dari studi perihal musik biasanya menghasilkan arsitektur yang sifat dan konsepnya informal, berasal dari metodologi musik yang dinilai informal pula. Maka kemudian menjadi sebuah penelusuran baru apabila musik dalam proses tersebut dianggap sebagai metodologi informal untuk menciptakan suatu karya/produk arsitektur yang bersifat formal.

Formalitas dalam produk arsitektur biasanya ditemukan dari sifat dan implementasi konsepnya. Dalam hal ini, arsitektur hadir guna memfasilitasi kebutuhan kegiatan pada lingkungan terbangun, termasuk dalam konteks politik dan pemerintahan. Arsitektur memfasilitasi aktivitas politik pada suatu sistem pemerintahan yang menganut suatu ideologi atau sistem demokrasi tertentu. Bangunan-bangunan pada pemerintahan dapat membentuk sebuah kultur politik dan di sisi lain juga dapat mengekspresikan kultur politik tersebut. arsitektur ini dapat dikategorikan berdasarkan bentuk sistem pemerintahan yang dianut dalam suatu wilayah, mewujudkan nilai-nilai politik, mempengaruhi perilaku para politisi dan pejabat, dan menyampaikan cita-cita pemerintahan, otoritas, dan kedaulatan nasional (Psarra et al, 2023). Ketika dipahami demikian, maka arsitektur formal pemerintahan dapat diterka dan dinilai dari proses perancangan dan bagaimana performa arsitektur tersebut dapat tercapai sesuai dengan fungsinya. Performansi pada suatu bangunan pemerintahan formal ini biasanya diekspresikan lewat representasi akan suatu pemerintahan yang berlaku.

Bangunan-bangunan seperti gedung parlemen, istana presiden, dan kementerian mencerminkan nilai-nilai politik, budaya, dan fungsi masyarakat yang dilayani. Dalam konteks sistem demokrasi, gedung parlemen berfungsi sebagai ruang bagi legislatif untuk menjalankan tugas-tugas seperti membuat undang-undang, perwakilan elektoral, dan pengawasan pemerintah. Ruang-ruang seperti plenary hall dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek penting seperti dimensi dan tata letak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses legislatif dan membentuk budaya politik di dalamnya. Dengan demikian, arsitektur pemerintahan menjadi fasilitas yang mendukung terciptanya keputusan politik yang

efektif dan demokratis.

Selain berfungsi sebagai fasilitator pemerintahan, arsitektur juga berperan sebagai manifestasi ideologi politik dan alat komunikasi visual kekuasaan. Melalui pendekatan formal yang sering kali monumental dan hierarkis, bangunan-bangunan pemerintah dirancang untuk mencerminkan otoritas dan kontrol negara. Arsitektur ini mempertegas dominasi politik melalui desain yang megah, simbolisme kekuasaan, dan elemen-elemen yang mengomunikasikan stabilitas dan hierarki sistem pemerintahan. Namun, formalisme ini sering kali dianggap rigid dan kaku, kurang mencerminkan dinamika demokrasi yang hidup di masyarakat. Dengan begitu, arsitektur formal kerap menjadi instrumen untuk memperkuat narasi kekuasaan negara serta memperjelas peran pemerintah sebagai pengendali dan pengawas. Arsitektur memperkuat tatanan politik yang berlaku dengan mengekspresikan nilai-nilai inti melalui berbagai cara mulai dari elemen komposisi hingga kosakata ornament (Leeuwen, 2024).

Saat suatu pemerintahan menganut suatu sistem demokrasi, menjadi penting untuk menciptakan arsitektur pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi tersebut secara fisik dan simbolis. Seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi, bangunan pemerintah, terutama gedung parlemen, harus mampu mengekspresikan prinsip keterbukaan, representasi, dan keterlibatan masyarakat. Arsitektur pemerintahan yang demokratis tidak hanya harus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya prosedur politik formal, tetapi juga harus menyediakan ruang bagi dialog dan partisipasi publik yang inklusif. Desain yang tepat dapat menjembatani ketegangan antara formalitas proses politik dan keterlibatan masyarakat yang lebih informal, menciptakan ruang yang mewakili suara rakyat secara simbolis dan memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi.

Dalam konteks ini, arsitektur memiliki peran penting sebagai objek manifestasi ideologi dan pencerminan kondisi sosial politik demokrasi, yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Arsitektur menjadi penggabungan formal-informal secara integral yang memfasilitasi maupun merepresentasikan nilai-nilai demokrasi sebagaimana adanya yang tertera dalam nilai-nilai tersebut. Maka dari itu, penting bagi suatu objek arsitektur sebagai perwujudan demokrasi berisikan representasi dan memberikan simbol partisipasi, deliberasi dan negosiasi yang menghubungkan formalitas ide-ide abstrak tentang demokrasi dengan informalitas representasi kondisi dan pengalaman kontekstual warga negara dalam ranah demokrasi.

Penghubungan antara ide-ide abstrak demokrasi dengan pengalaman fisik suatu lingkungan dengan sistem pemerintahan demokrasi dapat dicerminkan melalui berbagai

bentuk informal, salah satunya dengan suatu artefak kultural berbentuk seni yang menjadi pendokumentasian suatu fenomena di dalam kondisi sosial politik. Karya-karya seni yang mempunyai nilai kesenian terutama naratif berupa sosial politik bisa menjadi penggambaran yang dekat dengan realita atas suatu kondisi sosial politik pada masa tertentu, termasuk karya seni musik naratif bertemakan sosial politik. Kepemilikan “intra-inderawi” tentang apa yang terkait erat dengan pengalaman manusia tentang dunia sekitar, yang memungkinkan kita untuk melihat seni untuk mendapatkan kesadaran yang lebih besar tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita (O’GORMAN,1966). Dengan bantuan media sinestesia yang mentranslasikan suatu musik menjadi suatu produk visual, musik naratif dapat menjadi sebuah representasi melalui bantuan fenomenologis yang lebih dekat lagi dengan realita.

1.2. Rumusan Masalah

Perancangan Kompleks Parlemen Nusantara: Perwujudan Konsep Arsitektur Demokratis Melalui Sinestesia Musik Naratif Sosial Politik ini akan menelusuri bagaimana merancang arsitektur parlemen yang reflektif dan representatif terhadap dialog antara pemerintah dan rakyat, dengan menggabungkan metode desain formal dan informal, menggunakan sinestesia musik sosio politik sebagai media untuk merepresentasikan dialog tersebut.

1.3. Tujuan/Proposisi

Tujuan dalam perancangan Kompleks Parlemen Nusantara: Perwujudan Konsep Arsitektur Demokratis Melalui Sinestesia Musik Naratif Sosial Politik ini adalah untuk merancang sebuah gedung parlemen sebagai perwujudan konsep arsitektur demokratis secara arsitektural merefleksikan dan merepresentasikan dialog formal-informal antara pemerintah dan rakyat melalui integrasi desain formal dan informal, dengan sinestesia musik sosio politik sebagai media ekspresinya.

1.4. Manfaat

1.5.1 Manfaat Subjektif

Manfaat subjektif penyusunan proposal perancangan ini adalah sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas Mata Kuliah LP3A Program Studi S1 Arsitektur Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

1.5.2 Manfaat Objektif

Manfaat objektif penyusunan proposal perancangan ini adalah sebagai sebuah usulan desain yang harapannya dapat memberi manfaat terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan arsitektur, khususnya menambah wawasan terkait arsitektur yang mampu merespon emosi manusia.

1.5. Ruang Lingkup

1.6.1. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial pembahasan ini meliputi ilmu dan teori arsitektur, terutama mengenai Konsep Arsitektur Demokratis dalam bangunan pemerintahan. Hal di luar ilmu arsitektur yang relevan yaitu ilmu dan teori psikologi, seni naratif, seni musik, dan neurosains akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung topik utama.

1.6.2. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial pembahasan ini adalah terkait perencanaan dan perancangan Kompleks Parlemen Nusantara: Perwujudan Konsep Arsitektur Demokratis Melalui Sinestesia Musik Naratif Sosial Politik yang akan mengkaji tipologi, topologi, metodologi, pemrograman kreatif, dengan tetap memperhatikan standar-standar perancangan sebuah bangunan Kompleks Parlemen.

1.6. Metode Pembahasan

Metode penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini menggunakan metode deskriptif, dokumentatif, dan komparatif yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan.

- a. Metode Deskriptif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur/studi pustaka dari internet, buku, artikel jurnal, ataupun observasi lapangan.
- b. Metode Dokumentatif, yaitu pendokumentasian data yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan perancangan.
- c. Metode Komparatif, yaitu melakukan studi referensi terhadap beberapa objek dengan pendekatan serupa atau tipologi serupa yang sudah ada sebelumnya sebagai acuan desain yang baik.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A), yaitu sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan , manfaat, ruang lingkup, metode, sistematika pembahasan, dan alur pikir.
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	Berisi studi literatur mengenai teori-teori yang relevan untuk dikaji, yaitu terkait tipologi bangunan pemerintah dan konsep arsitektur demokratis serta tinjauan terkait dengan metodologi praktik sinestesia musik naratif dalam arsitektur
BAB III	TINJAUAN PENGGUNA, OBJEK, LOKASI, DAN REFERENSI
	Berisi penjelasan mengenai pengguna, objek. dan lokasi perancangan, serta kriteria fisik dan nonfisik, dan tinjauan terkait referensi yaitu musik naratif sebagai objek metode representasi melalui media sinestesia

1.8. Alur Pikir

Berikut adalah alur pikir proses perencanaan dan perancangan dalam bentuk diagram berupa penyusunan proses berpikir dari latar belakang sampai studi secara runut dan sistematis

